

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi.

Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jika dihubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana.

⁵Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.1

2. Pembagian Hukum Pidana

1) Hukum Pidana dapat dibagi dalam:

- a. Hukum Pidana Materiil, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, hukum pidana materiil misalnya termuat dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.
- b. Hukum Pidana Formil, yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil misalnya termuat dalam KUHP atau Undang-undang nomor 8 tahun 1981.

2) Hukum Pidana juga dapat dibagi dalam:

- a. Hukum Pidana Umum, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan ini misalnya termuat dalam KUHP, Undang-undang Lalu Lintas dan lain-lain.
- b. Hukum Pidana Khusus, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Kekhususan dari aturan-aturan hukum pidana khusus ini bisa disebabkan karena berkaitan dengan orangnya misalnya hukum pidana militer, ataupun berkaitan dengan jenis perbuatannya, misalnya

Undang-Undang korupsi, hukum pidana fiscal yang memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak.

3. Tujuan Hukum Pidana

Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Terdapat dua aliran dalam tujuan hukum pidana yaitu:

a) Aliran Klasik

Aliran klasik ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.⁶

b) Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.⁷

⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 25

⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 32

4. Ruang Lingkup Hukum Pidana

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Pompe hukum pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁸

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

b. Kesalahan dan Pertanggung Jawaban Pidana

⁸Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 81

⁹Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 69

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pertanggung jawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Menurut Bambang Poernomo menjelaskan, kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dulu, baru kemudian segi yang kedua untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana.¹⁰

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan yang pada intinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggung jawaban secara pidana.

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawaban atas pidana yang dilakukan.¹¹

Dengan demikian seseorang mendapat pidana tergantung dari dua hal yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau

¹⁰ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 19

¹¹ S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV Alumni Ahaem-Patahean, Jakarta, hlm. 245

dengan kata lain harus ada unsure melawan hukum dan harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang jadi ada unsur subjektif.

Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹²

c. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidaan adalah bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi yang positif bagi terpidana, korban dan juga bagi masyarakat.

Pemidanaan sendiri bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

¹²Mahrus Ali, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II Kencana, Jakarta, hlm. 68.

2. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan sendiri di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini tidak dirumuskan secara eksplisit, tujuan pidanaan hanya ditemukan dalam ilmu hukum.

Pidanaan tanpa tujuan akan membabi buta, kehilangan arah dan akan mencabik-cabik pidanaan itu sendiri. Barda Nawawi menyatakan, “Tujuan inilah yang merupakan jiwa atau roh atau spirit dari sistem pidanaan”.¹³

Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan. Teori tentang tujuan pidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan

¹³Barda Nawawi Arief 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan*, “*Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 8.

terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward- looking*).¹⁴

Pandangan *utilitarian* melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁵

4. Pengertian dan Jenis Pidana

Dalam ketentuan pasal 10 KUHP (dalam bab II) menyatakan Pidana terdiri atas :

a. Pidana:

- 1) Pidana Pokok : Pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda.
- 2) Tambahan : Pencabutan hak- hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim¹⁶

¹⁴Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pembedaan*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm. 93.

¹⁵Marcus Priyo Gunarto, Op.Cit., hal 94.

¹⁶Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 47-50 dalam Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal 36-37.

Menurut Sudarto, Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “straf” namun istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.¹⁷

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan, “Istilah “hukuman” yang merupakan istilah dan konvensional, dapat merupakan arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus. Maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.”¹⁸

Hakikat pidana menurut Hulsman adalah “*tot de orde reopen*” (menyerukan untuk tertib). Sedangkan Binsbergen berpendirian bahwa ciri hakiki pidana adalah “*een terechtwijzing door de overheid terzake van een strafbaarfeit*” (suatu pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana).¹⁹

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.2

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hal.3

¹⁹Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.81.

syarat tertentu.²⁰ Sedangkan Roeslan Saleh merumuskan pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²¹

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan rumusan secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut:²²

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

B. Lembaga Pemasyarakatan

1. Definisi Pemasyarakatan

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapat pembinaan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu system pembinaan terhadap pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi social antara Warga Binaan dengan masyarakat.

²⁰Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.2

²¹Roeslan Saleh, dalam Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal.21.

²²Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.4

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar Warga Binaan mampu memperbaiki diri dengan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya. Kegiatan dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sekedar untuk menghukum mereka tetapi itu salah satu bentuk proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan mereka yang pernah dilakukan, dengan demikian Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani masa hukumannya mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dimana ia tinggal.

Menurut Sudarto, Pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.²³

Mengenai pengertian resosialisasi Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Suatu Proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah system nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.”²⁴

Jadi inti dari proses resosialisasi ini adalah untuk mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan

²³ Suryobroto, B, 1972, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Hal. 34

²⁴ Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Centara, Jakarta, Hal 28-29

motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna setelah menjalani masa hukumannya.

Dengan kata lain pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan untuk memberi perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang lebih positif dari yang sebelumnya, para petugas pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang menjalankan peranan penting sebagai pendorong, pembimbing agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Bambang Poernomo memberikan batasan mengenai system pemasyarakatan:

“Merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan system dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk social. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik.”²⁵

2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Dalam masa penjajahan Belanda, pada saat itu Belanda mulai menguasai beberapa bagian dari Indonesia, maka sejak itulah dirasa perlu diadakan peradilan untuk orang-orang Pribumi. Hukum yang berlaku atau yang dianggap berlaku bagi orang Pribumi dengan batasan antara lain, mengenai jenis pidana dan azas keseimbangan di dalam penjatuhan pidana,

²⁵ Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Pidana Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 53

pidana potong tangan dan kaki dihapus, sedang yang masih dipertahankan adalah pembakaran, penusukan dengan keris, penderaan, mencap dengan besi panas, perantaraan, dan hukuman kerja paksa.²⁶

Pada zaman Hindia Belanda, berdasarkan penelitian Notosoesanto, yang dilakukan beliau ketika menjabat sebagai Kepala Jawatan Kependidikan, rumah tahanan pada zaman Penjajahan Belanda ada tiga macam:

1. *Bui* (1602) tempatnya dibatasi pemerintah kota;
2. *Ketingkwartier*, merupakan tempat buat orang-orang perantaraan;
3. *Vrouwentuchthuis*, adalah tempat menampung orang-orang perempuan Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*).²⁷

Tahun 1800–1816 ketika Raffles memimpin pemerintahan pada saat itu, dia mencoba untuk memperbaiki keadaan buruk pada masa lalu dan memerintahkan agar di tiap-tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan *bui*. Pada tahun 1919 pemerintah Belanda mengulangi apa yang telah dilakukan oleh Raffles, dimana orang-orang dibagi:

1. Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
2. Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

²⁶Sudarto.1981. *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 25

²⁷ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta Hal. 77.

Pada tahun 1870 didirikan *Departement Justice* yang kemudian merancang peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda, yang dimuat dalam lembaran Negara (Staablade 1871 No. 78/ Tuchtreglement van 1871). Peraturan ini memerintahkan supaya dipisah-pisahkan:²⁸

- a. Golongan Indonesia dengan golongan Eropa;
- b. Perempuan dengan laki-laki;
- c. Terpidana berat dengan terpidana lainnya.

Tiap penjara diwajibkan untuk mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam beberapa bagian menurut golongannya, seperti golongan Indonesia dan Golongan Eropa, laki-laki dan perempuan, tindak pidana berat dan ringan dan lain sebagainya. Kepala penjara dilarang memasukkan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.²⁹

Perubahan besar dalam sistem penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang lebih luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang dianggap cakap dalam urusan kepenjaraan mulai direkrut. Di penjara Glodok diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada

²⁸*Ibid. Hal. 76-83.*

²⁹Suwarto. 2007. Disertasi Doktor: *Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, Universitas Sumatera Utara, Medan, Hal. 101-100.

beberapa narapidana kerja paksa.³⁰ Sehubungan dengan percobaan ini, maka Staatblad 1871 No. 78 mendapat sedikit perubahan. Dalam jangka waktu 1905 sampai 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh. Penjara-penjara pusat biasanya berukuran sangat besar, dengan kapasitas kira-kira untuk 700 orang terpidana, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.³¹

Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang pemerintah melakukan percobaan penjara dengan mengadakan tempat tidur yang terpisah untuk setiap narapidana, yang kemudian disebut sebagai “*chambretta*” yaitu sel yang berupa sangkar negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud mencegah perbuatan cabul antara narapidana satu dengan yang lainnya.³²

Pada tahun 1930 diadakan perubahan terhadap penjara, yaitu :

- 1) Pembagian narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1 (satu) tahun dalam 2 (dua) golongan sesudah diselidiki lebih dulu di

³⁰ Mohammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta Hal. 139.

³¹ *Ibid.*

³² Mohammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta Hal. 140.

clearing- house di Surabaya dan Glodok yaitu :

- a. Golongan yang dipandang mudah untuk dididik baik.
 - b. Golongan yang dipandang sukar untuk dididik baik.
- 2) Mengadakan bagian semacam *reformatory* seperti di Elmira (yang diperuntukkan pemuda-pemuda dari 16 sampai 30 tahun) di penjara Malang, Madiun dan Sukamiskin, untuk golongan tersebut di atas.
 - 3) Mengadakan psychopaten (perbaikan orang sakit jiwa) di Glodok.
 - 4) Mengadakan sistem cellilousie.
 - 5) Penjara untuk golongan Eropa di Semarang di pindah ke Sukamiskin.
 - 6) Kursus-kursus untuk pegawai kepenjaraan.
 - 7) Mengangkat seorang pegawai *reklasaring*.
 - 8) Mendirikan dana *reklasaring*.³³

Sejarah masa lampau tentang gambaran penjara pada zaman penjajahan Belanda, penuh dengan penderitaan yang kini masih terlihat pada bangunan-bangunan penjara dengan sel-selnya. Bangunan penjara dirancang sedemikian rupa secara khusus sebagai tempat untuk membuat jera para pelanggar hukum. Oleh karena itu namanya menjadi penjara, yaitu tempat untuk membuat jera.³⁴

Kemudian pada zaman kemerdekaan tercetuslah gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidatonya saat penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut: “Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana

³³*Ibid*, hal. 141.

³⁴ Suwanto, *Op.Cit.* Hal. 103.

agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat, diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.³⁵

Dalam perkembangan selanjutnya diharapkan Indonesia terus melakukan segala macam upaya perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan : UU No. 12/1995).

3. Tujuan, Fungsi dan Sistem Pemasyarakatan

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara

³⁵ Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal.62

dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Posisi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan di dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*supression of crime*).³⁶ Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu bersifat positif, apabila bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, bahkan mencela Lembaga Pemasyarakatan jika mantan narapidana yang pernah dibina menjadi seorang residivis.³⁷

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

³⁶ Irwan Petrus Panjaitan. 1992. *Persepsi Bekas Narapidana Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Hal. 139 – 141.

³⁷ Suwanto. *Op.Cit.* Hal. 126.

bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga menyatakan bahwa:

“Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.”

Mengenai struktur sistem pemasyarakatan, tentang perubahan yang dilakukan sebagai berikut: pemasyarakatan berorientasi pada pengayoman dan pembinaan.³⁸ Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan ini berlaku untuk segala segi yang ada dalam proses pembinaan pemasyarakatan. Baik untuk pembinaannya di dalam lembaga pemasyarakatan maupun mengenai pembinaannya di luar lembaga pemasyarakatan.³⁹

Sistem pemasyarakatan di dalamnya terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan kembali kedalam kehidupan masyarakat. Proses pembinaan ini dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap. Tahap pertama,

³⁸ G. Suyanto. 1981. *Seluk Beluk Pemasyarakatan*. BPHN, Departemen Kehakiman R.I.Hal.7.

³⁹Suwarto.*Op.Cit.* Hal. 108.

yaitu tahap *maximum security* sampai batas 1/3 dari masa pidana yang dijatuhkan. Tahap kedua adalah *medium security* sampai batas 1/2 dari masa pidana yang dijatuhkan. Tahap ketiga, *minimum security* sampai batas 2/3 dari masa pidana yang dijatuhkan. Tahap keempat yaitu tahap integrasi dan selesainya 2/3 dari masa pidana sampai habis masa pidananya.⁴⁰

Tahap-tahap sebagaimana telah diuraikan di atas hanya diberikan apabila narapidana benar-benar mengikuti aturan-aturan yang telah berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan tekun hingga berkelakuan baik dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Tetapi apabila ia berkelakuan tidak baik maka ia tidak akan dinaikkan ke tahap berikutnya atau misalnya ia sudah berkelakuan baik dan naik pada tahap berikutnya, namun ia membuat keributan dan mengadakan pemberontakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, atau bahkan melarikan diri lalu kemudian tertangkap lagi, maka ia kembali ke tahap pertama (tahap *maximum security*). Untuk itu secara idealnya setiap Lembaga Pemasyarakatan secara khusus diperuntukkan bagi narapidana atau anak didik berdasarkan pada tahap-tahap sebagaimana telah dijelaskan di atas.

⁴⁰Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 72-73.

C. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang sudah melakukan tindak pidana yang kemudian divonis hukuman oleh hakim dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah:

1. Faktor lingkungan dan pergaulan;
2. Faktor kurangnya perhatian dari keluarga;
3. Faktor ekonomi;
4. Faktor keinginan;
5. Faktor kesempatan;
6. Faktor kurangnya iman.⁴¹

Warga Binaan atau Narapidana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang disebutkan bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sementara itu, berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dikatakan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang hilang kemerdekaan karena menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.⁴²

⁴¹Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 64

⁴² Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, hlm. 53

Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani persidangan, dan sudah divonis hukuman oleh hakim serta ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya dan mendapatkan pembinaan.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

a) Hak Narapidana

Dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana atau warga binaan berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan ini sering tidak dapat terlaksana dengan baik oleh petugas pemasyarakatan atau yang memiliki wewenang yang mempunyai peranan penting sebagai komponen

utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman dengan sistem pemasyarakatan.

b) Kewajiban Narapidana

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 15 disebutkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana yaitu:

- 1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu;
- 2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hak dan Kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Dalam hal ini narapidana bukan hanya menuntut pemenuhan hak saja, tetapi narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik.

3. Hak Narapidana Melakukan Ibadah

Dalam kehidupan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan direnggut kebebasannya atau hilang kemerdekaan Bergeraknya, sehingga menimbulkan rasa frustrasi pada psikis narapidana tersebut akibat hak-hak pribadi selaku seorang yang memiliki hati nurani.

Seorang warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat terpenuhi keinginannya karena terdapat batasan-batasan yang diatur dalam lembaga tersebut. Hal demikian dapat mengganggu psikis narapidana tersebut dan akhirnya merambat ke keadaan fisiknya.

Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah disebutkan bahwa narapidana atau warga binaan berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Maka dari itu, warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berhak melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selain dalam Undang-Undang tersebut, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan mengatur tentang hak untuk melakukan beribadah yaitu:

Pasal 2

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan;
3. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

1. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan;
2. Jumlah petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS;
3. Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bagian Kedua Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani.

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

1. Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
2. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
3. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

4. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, yang mana dalam sebuah sistem terdapat komponen-komponen yang saling berakaitan di dalamnya. Pemasyarakatan dinilai sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana.⁴³ Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar tidak mengulangi tindak pidananya, menginsafi kesalahannya, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Maka dalam pelaksanaan sistem pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan antara komponen-komponen

⁴³ Sri Wulandari. *Op.Cit.* Hal. 2.

penting yang ada dalam proses pembinaan narapidana,⁴⁴ terdapat setidaknya

ada empat komponen penting yang ada dalam pembinaan narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar lembaga pemasyarakatan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain.⁴⁵

Keempat proses di atas dianggap sebagai komponen paling penting dalam proses menjalankan sistem pembinaan narapidana karena keempat komponen tersebut adalah komponen terdekat yang ada di dalam sistem pembinaan narapidana itu sendiri.

Selanjutnya pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan”.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ CI. Harsono. *Op. cit.* Hal. 51